

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Abidin, Slamet. 1999. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Pustaka Setia.
- Admosudirjo, Prajudi, 1983. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Anwar, Saiful, dan Lubis, Marzuki 2004. *Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara*. Medan: Gelora Madani.
- Atmasasmita, Romli. 1997. *Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hadikusuma, Hilman, 1992, *Bahasa Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Hamdani, Al, 2002. *Risalah Nikah*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Kanter, EY, dan Sianturi, SR, 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika.
- Kumorotomo, Wahyudi, 2001. *Etika Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mustafa, Bachsan, 2001. *Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Saksono, Slamet , 1989. *Administraasi Kepegawaian*. Jakarta: Kanisius.
- Salah, Roeslan, 1987, *Sifat Melawan Hukum Dari Perbuatan Pidana*, Jakarta: Aksara Baru.
- Simorangkir, JCT, dan kawan-kawan. 2009. *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soekanto, Soerjono, 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Soesilo, R, 1991. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- Susanto, Happy, 2007. *Nikah Siri, Apa Untungnya*. Jakarta: Visi Media.

Syafe'i, Rachmat, 2004. *H Muamalah*. Jakarta: Pustaka Setia.

Syarifin, Pipin, 2000. *Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia.

B. Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Ijin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Putusan Badan Pengadilan. "Pegawai Negeri Kawin Lagi Kadonya Hukuman Penjara". *Varia Peradilan Majalah Hukum*. Tahun Xx No. 230 Nopember 2004.

C. Internet:

Badan Kepegawaian Negara. "Pernikahan PNS".
<http://www.bkn.go.id/in/peraturan/pedoman/pernikahan-pns.html>

Subbagian Penyajian Data dan Informasi - Biro SDM - Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan. <http://www.sdm.depkpu.go.id/manajemen.cfm?id=20>.

Prabu Kresna. "Analisis Perkawinan PNS".
<http://agityakresna.blogspot.com/2010/05/analisis-perkawinan-pns.html>.

Wikipedia Indonesia. "Pegawai Negeri". http://id.wikipedia.org/wiki/Pegawai_negeri.